Lampiran 1

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Nomor : 180/ \$\mathbf{l}\$ /KEP/35.07.122/2018

Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

STANDAR PELAYANAN IZIN PEMAKAIAN PESAWAT UAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1. S	Service Delivery	
1. \$	Persyaratan	 Izin Baru Surat Permohonan; Gambar rencana alat, bahan, instalasi dar kontruksi yang telah disahkan; Hasil perhitungan kekuatan bahan yang dipaka disesuaikan dengan peralatan teknisnya; Sertifikat alat dan bahan yang digunakar berdasarkan spesifikasi dan standarisasi; Sertifikat atau SK penunjukan PJK3 sesuai bidang peralatan teknisnya; Sertifikat juru las yang sesuai standarisasi alat yang dibuat disesuaikan dengan jenis peralatar teknisnya; Hasil pengujian / tes terhadap kelayakan pemakaiar peralatan teknis K3 dari pabrik pembuat disesuaikan dengan jenis peralatan teknisnya; Materai Rp. 6000 sebanyak 2 lembar Foto 4x6 (Berwarna) 2 lembar Fotokopi KTP Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan untuk yang
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pemohon, serahkan berkas dan memberikan tanda terima 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap; 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima; 3) Bidang memproses permohonan izin; 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 14 hari sejak berkas dinyatakan lengkap.
4.	Biaya / tarif	Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	Sertifikat Izin Pemakaian Pesawat Uap.
6.	Penanganan pengaduan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

		Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0341-396633 Fax: 0341-396633 SMS: 082337781113 Email: pm-ptsp@malangkab.go.id Website: www.pm-ptsp.malangkab.go.id
	Manufacturing	
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Uap Tahun 1930 (STOOM ORDONANTIE 1930) (Stb. No. 225 Tahun 1930); Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan; Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018, tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2.	Sarana, prasarana, dan	Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan
	fasilitas	Standar Pelayanan Peralatan komputer pendukung perizinan
3.	Kompetensi pelaksana	 SDM yang memiliki pengetahuan di Izin Pemakaian Pesawat Uap SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang.
4.	Pengawasan internal	Supervisi atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat Dilaksanakan secara kontinyu
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang disetiap bidang perizinan
6.	Jaminan pelayanan	Apabila penerbitan izin melewati batas waktu yang ditentukan, maka petugas mempunyai kewajiban untuk mengantarkan sertifikat ke alamat pemohon
7.	Jaminan keamanan	Izin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan.